

**Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi Penduduk  
Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka  
(Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Radewa Rizki Mirma Wijaya  
105020101111018**



**KONSENTRASI EKONOMI SUMBER DAYA  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**

**Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka  
(Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012)**

**Radewa Rizki Mirma Wijaya  
Devanto Shasta Pratomo, SE., MSi., MA., Ph.D.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang  
Email : [radewarizki@yahoo.com](mailto:radewarizki@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

Fenomena pengangguran terbuka adalah individu yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan Pengangguran terbuka juga dikatakan sebagai wujud dari kemajuan teknologi yang dapat mengurangi tenaga kerja. Sehingga peneliti mencoba fokus pada realita pengangguran yang terjadi di Gerbangkertasusila. Adapun tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila. Peneliti menempatkan penagngguran terbuka sebagai variabel dependen dan mengambil variabel independen : upah minimum, PDRB, dan populasi penduduk. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel upah minimum, PDRB, dan populasi penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila. Data yang digunakan menggunakan data panel dengan mengambil 7 kabupaten/kota yang terdapat di Gerbangkertasusila dengan runtut waktu 6 tahun (2007-2012). Melalui data sekunder yang diambil dari studi pustaka baik literature BPS, jurnal dan penelitian terdahulu. Data tersebut diolah dengan menggunakan analisis *Random Effect Model* (REM) dibantu dengan *software* Stata 10 dalam pengoperasiannya.

Hasil penelitian pada model pertama menunjukkan pengaruh variabel upah minimum ( $X_1$ ) terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien bertanda negatif sebesar 0,0883934 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,09 persen di Gerbangkertasusila.

Pada model kedua menunjukkan pengaruh variabel PDRB ( $X_2$ ) terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,0295291 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 0,03 persen di Gerbangkertasusila.

Pada model ketiga menunjukkan pengaruh variabel populasi penduduk ( $X_3$ ) terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien bertanda negatif sebesar 0,0330812 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan populasi penduduk sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,03 persen di Gerbangkertasusila.

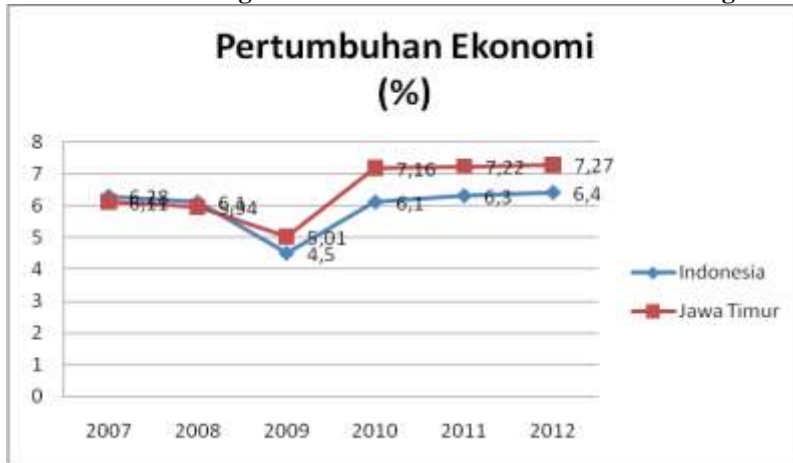
**Kata Kunci : Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, PDRB, Populasi Penduduk**

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam khasanah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penting, khususnya dalam era modern ini. Provinsi yang berada diujung paling timur Pulau Jawa ini pada era modern ini menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan bahwa Jatim telah melakukan quatrik dalam mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional setidaknya sejak Tahun 2009-2012. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi kedua setelah DKI Jakarta. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Jawa Timur Tahun 2007-2012



Sumber : BPS Nasional 2013 (diolah)

Menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional menetapkan kawasan kerjasama yang dikelompokkan dalam 9 satuan wilayah pembangunan (SWP). Penetapan kawasan kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Salah satu wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur adalah SWP I Gerbangkertasusila yang didalamnya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. Peneliti tertarik mengambil lokasi kawasan Gerbangkertasusila karena merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang berpusat di Surabaya, kawasan ini serupa dengan istilah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. Gerbangkertasusila merupakan pusat dari perekonomian yang ada di provinsi Jawa Timur. Lebih dari 50% perekonomian Jawa Timur ditopang oleh SWP I Gerbangkertasusila karena letaknya sangat strategis dan berdekatan dengan Kota Surabaya yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi se Jawa Timur ditambah lagi kabupaten lainnya di Gerbangkertasusila yang merupakan kota penyangga (*zone buffering*) dari Kota Surabaya.

Dibalik perekonomian yang tinggi pada di Gerbangkertasusila terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah masalah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila termasuk kategori tinggi karena rata-rata tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Gerbangkertasusila lebih dari 5%. Pengertian dari pengangguran terbuka sendiri adalah seseorang yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka normal disuatu wilayah adalah tidak lebih dari 4%. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka Gerbangkertasusila lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur. Dari fenomena tersebut dapat dilihat ketimpangan yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Gerbangkertasusila. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka Gerbangkertasusila dengan Jawa Timur.

Gambar 2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Gerbangkertasusila dengan Jawa Timur Tahun 2007-2012



Sumber: BPS Jatim, 2013 (diolah)

Dari fenomena diatas, peneliti mengambil variabel tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Dalam sebuah penelitian terdapat variabel dependen dan juga variabel independen. Tentunya variabel dependen bias berubah karena dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 variabel independen yang tentunya mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran terbuka.

Variabel independen yang pertama adalah upah minimum. Menurut Kusnani (1998) menyatakan bahwa upah minimum adalah sebuah kontrofersi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional. Pada realitanya menurut Alghofari (2010) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran. Pada tabel 1 dibawah ini menunjukkan data perkembangan upah minimum di masing-masing daerah di Gerbangkertasusila dari tahun 2007-2012.

Tabel 1 Upah Minimum di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012 (Rupiah)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Gresik	743.500	803.652	971.624	1.010.400	1.115.000	1.257.000
Kab. Bangkalan	586.000	622.000	715.000	775.000	850.000	885.000
Kab. Mojokerto	740.000	803.652	971.624	1.009.150	1.105.000	1.234.000
Kota Mojokerto	656.600	687.500	760.000	805.000	835.000	875.000
Kota Surabaya	746.000	805.500	948.500	1.031.500	1.115.000	1.257.000
Kab. Sidoarjo	743.500	802.000	955.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000
Kab. Lamongan	600.000	650.000	760.000	875.000	900.000	950.000

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah PDRB. Untuk mengetahui tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat PDRB yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi. Karena PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. PDRB di wilayah Gerbangkertasusila memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. PDRB atas harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila PDRB mengalami peningkatan, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta atau berorientasi pada padat karya. Namun terdapat juga dalam teori pertumbuhan ekonomi yang menyakatkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pengangguran. Dikatakan berpengaruh positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut berorientasi pada padat modal. Tabel 2 dibawah ini dapat menunjukkan PDRB ADHK masing-masing kabupaten/kota di Gerbangkertasusila.

Tabel 2 **PDRB ADHK 2000 di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012 (miliar rupiah)**

Kab/kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Gresik	13.554	14.413	15.978	17.075	18.081	19.424
Kab. Bangkalan	2.969	3.165	3.321	3.502	4.078	4.567
Kab. Mojokerto	6.643	7.034	7.398	7.897	8.458	8.956
Kota Mojokerto	1.046	1.101	1.157	1.228	1.310	1.403
Kota Surabaya	73.160	77.718	82.015	87.829	94.471	101.671
Kab. Sidoarjo	22.521	23.609	24.768	26.161	27.966	29.958
Kab. Lamongan	5.129	5.448	5.792	6.191	6.625	7.098

Sumber : BPS Jatim, 2013 (diolah)

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah populasi penduduk. Pengertian dari populasi penduduk sendiri adalah sejumlah manusia yang mendiami atau menduduki suatu tempat tertentu. Populasi penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan beban dimasing-masing daerah, pasalnya sekarang ini lapangan pekerjaan sudah terbatas dan menipis karena tidak diimbangi dengan pertumbuhan penduduknya. Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat tiap tahun dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada pengangguran di daerah tersebut. Masalah pengangguran yang tidak teratasi akan mengakibatkan kemiskinan pada suatu wilayah. Seperti di wilayah Gerbangkertasusila yang populasi penduduk tiap tahun semakin meningkat karena kota dan kabupaten di wilayah Gerbangkertasusila adalah pusat dari perekonomian di provinsi Jawa Timur maka banyak penduduk dari luar kota bahkan luar pulau berurbanisasi ke kota dan kabupaten di Gerbangkertasusila ditambah dengan tingkat upah minimum di kawasan daerah tersebut termasuk kategori tinggi tentu penduduk akan memilih untuk kesejahteraan mereka.

Namun disisi lain banyaknya penduduk tidak selalu menimbulkan permasalahan terhadap tenaga kerja. Banyaknya penduduk bisa menjadi kekuatan dari wilayahnya untuk dapat berkembang karena dengan sumber daya manusia yang melimpah wilayah tersebut akan dapat memperoleh sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan output produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Dalam teori *dividen demografi* atau bonus demografi suatu wilayah akan menjadikan besarnya populasi penduduk sebagai kekuatan dari wilayahnya ketika rata-rata populasi penduduk tersebut berada pada usia produktif 15-64 tahun. Karena pada usia produktif populasi penduduk dalam jumlah yang besar dapat meningkatkan output produksi atau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Tabel 3 dibawah ini menunjukkan populasi penduduk masing-masing kabupaten/kota di Gerbangkertasusila tahun 2007-2012.

Tabel 3 **Populasi Penduduk di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012 (Jiwa)**

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Gresik	1.174.063	1.194.821	1.215.603	1.177.042	1.183.665	1.196.124
Kab. Bangkalan	940.331	956.996	973.681	906.761	911.863	919.002
Kab. Mojokerto	996.774	1.005.486	1.013.988	1.025.443	1.031.213	1.039.477
Kota Mojokerto	113.075	113.201	113.327	120.196	120.873	121.645
Kota Surabaya	2.628.113	2.630.079	2.631.305	2.765.487	2.781.047	2.791.761
Kab. Sidoarjo	1.759.623	1.781.405	1.802.948	1.941.497	1.952.421	1.981.096
Kab. Lamongan	1.188.559	1.189.087	1.189.615	1.179.059	1.185.693	1.196.124

Sumber : BPS Jatim 2013 (diolah)

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila?
3. Bagaimana pengaruh populasi penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila?

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Ketenagakerjaan

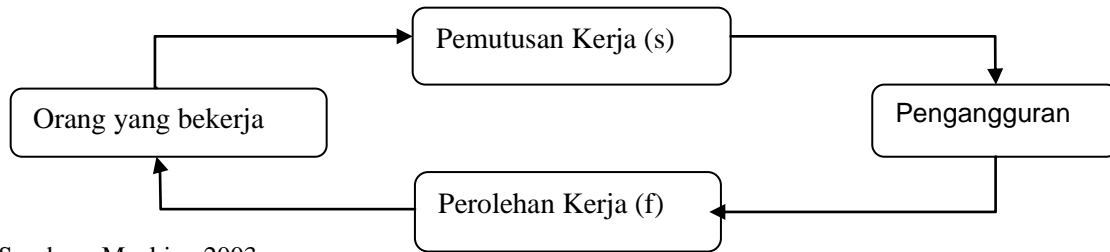
Sumber daya manusia atau sering disebut dengan *human resources* merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi (Suparmoko, 1997). Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985). Sedangkan menurut Secha Alatas dalam penelitian Ananta (2013), tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja.

Menurut Simanjuntak (1985) konsep dari tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlihat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (*employed persons*) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.

### Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Gambar 3 Transisi Menjadi Pekerja atau Penganggur



Sumber : Mankiw, 2003

Dalam setiap periode, bagian  $s$  dari orang-orang yang bekerja kehilangan pekerjaan mereka, dan sebagian  $f$  dari para penganggur memperoleh pekerjaan. Tingkat pemutusan kerja dan perolehan kerja inilah yang menentukan tingkat pengangguran (Mankiw, 2003).

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Pengangguran terbuka dapat juga dikatakan sebagai wujud dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri (Sukirno, 2004). Pengangguran terbuka adalah pengangguran baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan). Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Dapat disimpulkan pengertian dari pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.

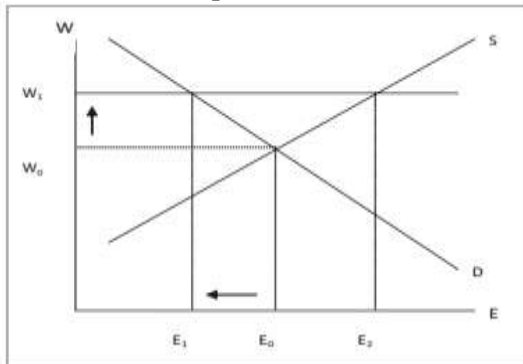
### Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan terendah (minimum) sebagai imbalan dari pengusaha yang diberikan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (Pratomo dan Saputra, 2011).

Dalam konteks pasar tenaga kerja kompetitif atau persaingan sempurna, pengusaha dan tenaga kerja dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pasar kerja, sehingga alokasi tenaga kerja dapat terjadi pada suatu ekuilibrium yang efisien. Dalam pasar ini, dengan menggunakan pendekatan maksimisasi profit, pengusaha akan mempekerjakan karyawannya sampai *marginal cost* mereka sama dengan *Marginal revenue product of labour*.

Sebagaimana dapat dijelaskan dalam kurva upah minimum di pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna pada gambar 4

Gambar 4 Kurva Upah Minimum di Pasar Kompetitif

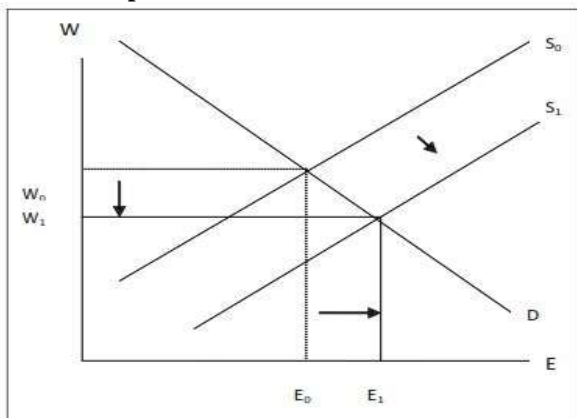


Sumber: Pratomo dan Saputra, 2011

Gambar 4 menunjukkan kondisi keseimbangan harga dan tenaga kerja dilihat dari model kompetitif. Kurva permintaan tenaga kerja digambarkan menurun (*downward sloping*) menunjukkan marginal revenue product of labour (*MRP*). *MRP* yang menurun ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap output (produktivitas) akan meningkat pada tingkat yang lambat laun menurun (*diminishing rate*) ketika tenaga kerja ditambah. Di sisi lain, kurva penawaran tenaga kerja adalah menaik (*upward sloping*) menggambarkan alternatif-alternatif penerimaan yang diterima oleh pekerja. Tingkat keseimbangan dari tingkat upah dan tenaga kerja ditunjukkan oleh pertemuan antara kurva permintaan (*D*) dan kurva penawaran (*S*). Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4, tingkat upah keseimbangan adalah  $W_0$ , sedangkan  $E_0$  keseimbangan tenaga kerja. Seandainya upah minimum berada di atas tingkat keseimbangan  $W_1$ , kondisi ini akan menciptakan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*) menggambarkan bahwa hanya  $E_1$  yang akan dipekerjakan dengan jumlah pekerja yang tersedia sebesar  $E_2$ . Kelebihan penawaran ini menyebabkan turunnya tenaga kerja yang akan dipekerjakan dari  $E_0$  (tingkat keseimbangan) ke  $E_1$ .  $E_1$  secara otomatis menunjukkan tingkat keseimbangan yang baru setelah adanya kebijakan upah minimum di dalam pasar kompetitif (Pratomo dan Saputra, 2011).

Terdapat juga teori model dual sektor dikembangkan oleh Welch (1974) adalah perluasan dari model kompetitif. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor di dalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) dan sector informal (sektor yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas yang sempurna antar dua sector tersebut. Sebelum adanya kebijakan upah minimum kedua sector ini diasumsikan menerima upah pada tingkat yang sama yaitu  $W_0$ . Penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa kerja di sektor informal lebih rendah, maka dampak distribusi pendapatannya akan justru memburuk (Sumarsono, 2009). ILO menambahkan bahwa sektor informal adalah bagian dari ekonomi pasar yang memproduksi secara legal barang dan jasa untuk dijual dan mendapatkan penghasilan. Sektor ini meliputi tenaga kerja yang terdapat di dalamnya, baik yang terdapat pada perusahaan informal (usaha kecil yang tidak terdaftar secara resmi) dan diluar dari itu. Wirausaha informal dan pekerja sektor ini memiliki karakter penting, yaitu tidak dikenali dan tidak dilindungi oleh ketentuan upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan.

Gambar 5 Upah Minimum di Sektor Informal



Sumber : Pratomo dan Saputra, 2011

Seandainya kemudian ada kebijakan upah minimum pada sektor formal yang lebih tinggi dibandingkan tingkat keseimbangan upah  $W_0$ . Hal ini akan menyebabkan sektor formal menjadi lebih dipilih oleh pekerja dibandingkan sektor informal. Dengan kata lain kebijakan upah minimum ini menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*) pada sektor formal. Berdasarkan model dual sektor ini kelebihan penawaran pada sektor formal akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Kondisi ini digambarkan oleh pergeseran dari kurva penawaran dari sector informal dari  $S_0$  pada gambar diatas. Pada kenyataannya pergeseran tenaga kerja juga dimungkinkan dari pasar informal menuju pasar formal, hal ini terjadi bilamana di pasar formal tercipta kesempatan kerja kembali sehingga mengundang pekerja di pasar informal untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran kurva penawaran tenaga kerja di pasar informal menjadi  $S_0$  sehingga tingkat upah di pasar informal mengalami kenaikan. Pada kenyataannya seorang tenaga kerja dapat dengan mudah berpindah dari satu sektor ke sektor yang lain karena terciptanya



kesempatan kerja dan tingkat upah yang lebih baik. Perpindahan tenaga kerja antar sektoral tersebut akan berhenti bila tingkat upah yang diharapkan (*expected wage*) antar sektor tersebut sama.

### **Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Berdasarkan BPS provinsi Jawa Timur, PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa. Dalam penghitungannya, untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga, harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor perdagangan dan sebagian subsektor pengangkutan.

Menurut (Kurniawan, 2013) berdasarkan penelitian terdahulu yaitu dari Nainggolan (2009) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara” yang menjadi rujukan dan persamaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran yang bersifat positif dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi. Dikatakan berpengaruh positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut berorientasi pada padat modal, dimana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. Adapun pengaruh negatifnya antara PDRB terhadap jumlah pengangguran dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia berdampak pada deras modal yang masuk sehingga memberikan kesempatan kerja yang ditandai pada banyaknya sektor usaha baru yang muncul yang sistemnya berorientasi pada padat karya, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Dalam teori relevannya, setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap sehingga dapat mengurangi pengangguran (Kurniawan, 2013).

### **Populasi Penduduk**

Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Bahkan populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya. Menurut *Marxist* tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). *Marxist* juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Selanjutnya terdapat teori penduduk modern dari pandangan Merkantilisme yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang banyak sebagai elemen yang penting dalam kekuatan negara yaitu merupakan faktor yang penting di dalam kekuatan negara dan memegang peranan dalam meningkatkan penghasilan dan kekayaan negara.

Masalah pertumbuhan penduduk di suatu daerah bisa berakibat dari segi positif dan segi negatif. Jumlah penduduk yang banyak di suatu daerah atau wilayah mempunyai akibat bagi kesempatan kerja pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Pada sisi positifnya apabila jumlah penduduk yang banyak disertai kemampuan dan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru, sehingga pada suatu daerah atau wilayah yang penduduknya mempunyai kemampuan dan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas dan dapat membuka lapangan kerja baru akan mengakibatkan daerah atau wilayah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah atau wilayah tersebut. Akan tetapi pada sisi negatifnya apabila jumlah penduduk yang banyak tidak disertai dengan kemampuan dan usaha dapat menghambat kesempatan kerja dan bisa berakibat menimbulkan pengangguran dan akan mengakibatkan kemiskinan pada suatu daerah atau wilayah. Jumlah penduduk yang banyak tidak disertai dengan lapangan kerja yang memadai akan menimbulkan banyak penduduk yang tidak tertampung dalam lapangan kerja maka masalah timbul yaitu pengangguran.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data *time-series* dan *cross-section* yaitu dengan menggunakan 6 tahun (2007-2012) dan mengambil 7 kabupaten/kota yang ada di Gerbangkertasusila. Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data sekunder dari studi baik literature BPS, jurnal, dan penelitian terdahulu sebagai metode pengumpulannya. Tentunya dalam pengolahan data terlebih dahulu di uji statistic dan juga uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Analisis data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) dengan pendekatan GLS (*Generalized Least Square*) yaitu mengkombinasikan informasi dari dimensi antar dan dalam (*between* dan *within*) data secara efisien. GLS dapat dipandang sebagai rata-rata yang dibobotkan dari estimasi *between* dan *within* dalam sebuah regresi yang dianalisis menggunakan *software* Stata 10. Bentuk persamaan regresi linear berganda yang dapat dirumuskan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : pengangguran terbuka
- $\alpha$  : koefisien konstanta
- $\beta_1$  : koefisien variabel upah minimum
- $\beta_2$  : koefisien variabel PDRB
- $\beta_3$  : koefisien variabel populasi penduduk
- X1 : variabel upah minimum
- X2 : variabel PDRB
- X3 : variabel populasi penduduk
- e : faktor pengganggu

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Gerbangkertasusila

Menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional menetapkan kawasan kerjasama yang dikelompokkan dalam 9 satuan wilayah pembangunan (SWP). Penetapan kawasan kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar Daerah. Salah satu wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur adalah SWP I Gerbangkertasusila yang didalamnya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan.

Gambar 6 Letak Wilayah Gerbangkertasusila di Jawa Timur



Sumber : Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerjasama Antardaerah

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS)

#### Asumsi Multikolinieritas

Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) hanya berpengaruh pada variabel respon dan bukan pada variabel bebas lainnya. Hipotesis pada asumsi ini yaitu :

$H_0$  : Terdapat multikolinieritas pada variabel bebas

$H_1$  : Tidak terdapat multikolinieritas pada variabel bebas

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menerima hipotesis  $H_1$  yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas/prediktor. Hipotesis  $H_1$  diterima apabila nilai korelasi antar variabel bebas atau *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Tabel 4 dibawah ini merupakan hasil dari uji multikolinieritas yang telah didapatkan:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolonearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Ln (PDRB)	5.43	0.184257
Ln (penduduk)	4.45	0.224515
Ln (upah)	1.50	0.668605
Mean VIF	3.79	

Sumber : Output Stata 10 (diolah)

Hasil dari pengujian non multikolinieritas. Dari hasil tersebut bisa dilihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dari variabel Ln(upah), Ln(pdrb), Ln(penduduk) adalah kurang dari 10. Maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis  $H_1$  yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas dan dapat dikatakan bahwa asumsi non multikolinieritas pada model ini terpenuhi.

#### Asumsi Heterokedastisitas

Pengertian dari asumsi Heterokedastisitas adalah bahwa ragam (variance) dari variabel pengganggu adalah sama. Hipotesis pada asumsi ini yaitu :

$H_0$  : Terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas

$H_1$  : Tidak terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menerima hipotesis  $H_1$  yaitu tidak terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas. Hipotesis  $H_1$  diterima apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5% (0,05). Tabel 5 dibawah ini menunjukkan hasil dari uji heterokedastisitas yang telah didapatkan :

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heterokedasticity	
Ho: Constant variance	
Variabel: fitted values of tpt	
Chi2 (1)	2.79
Prob > chi2	0.0948

Sumber : Output Stata 10 (diolah)

Hasil dari pengujian heterokedastisitas terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0948. Nilai tersebut melebihi atau lebih besar dari alpha 5% (0,05). Maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis  $H_1$  dan model regresi memenuhi asumsi non heterokedastisitas.

### Analisis Data Panel

Dalam melakukan analisis regresinya pada penelitian ini menggunakan aplikasi *software* STATA 10. Pada tabel 6 berikut ini merupakan hasil analisis regresi dari data yang telah diolah menggunakan aplikasi *software* STATA 10 :

Tabel 6 Hasil Pengolahan Data Panel

Random-effect GLS Regression		Number of obs = 42				
Group variabel : tahun		Number of groups = 6				
R-sq : within	= 0.4984	Obs per group : min = 7				
between	= 0.9118	avg = 7.0				
overall	= 0.6563	max = 7				
Random effects u_i ~ Gaussian		wald chi2 (3)	= 51.34			
Corr (u_i, X = 0 (assumed))		prob > chi2	= 0.0000			
TPT	Coef.	Std. Err.	z	P >  z	95% Conf.	Interval
Ln (Upah)	-.0883934	.0190274	-4.65	0.000	-.1256864	-.0511004
Ln (PDRB)	.0295291	.0042829	6.89	0.000	.0211348	.0379234
Ln (penduduk)	-.0330812	.0051533	-6.42	0.000	-.0431814	-.0229809
_Cons	.2176015	.1004885	2.17	0.030	.0206478	.4145553
Sigma_u = .00706567						
Sigma-e = .01423434						
Rho = .19768615 (fraction of variance due to u_i)						

Sumber : Output Stata 10 (diolah)

### Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial menunjukkan bahwa apakah setiap variabel bebas dapat memberikan pengaruh pada variabel terikat. Hipotesis pada uji t yaitu :

H<sub>0</sub> : Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat

H<sub>1</sub> : Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat

Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menerima hipotesis H<sub>1</sub>. Hipotesis H<sub>1</sub> diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada alpha 5% (0,05). Nilai probabilitas yang didapat dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Nilai probabilitas dari Ln(upah) sebesar 0.000. Jadi nilai dari probabilitas Ln(upah) lebih kecil daripada alpha 5% sehingga dapat dikatakan (0,000<0,050), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H<sub>1</sub> dan dapat dikatakan bahwa variabel Ln(upah) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Nilai probabilitas dari Ln(PDRB) sebesar 0.000. Jadi nilai dari probabilitas Ln(PDRB) lebih kecil daripada alpha 5% sehingga dapat dikatakan (0,000<0,050), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H<sub>1</sub> dan dapat dikatakan bahwa variabel Ln(PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
3. Nilai probabilitas dari Ln(Penduduk) sebesar 0.000. Jadi nilai dari probabilitas Ln(Penduduk) lebih kecil daripada alpha 5% sehingga dapat dikatakan (0,000<0,050), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H<sub>1</sub> dan dapat dikatakan bahwa variabel Ln(Penduduk) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Kebaikan suatu model penelitian diukur dengan menggunakan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Nilai R<sup>2</sup> semakin mendekati satu maka dapat dikatakan model penelitian semakin baik. Nilai Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang didapatkan adalah sebesar 0,6563. Maka besarnya pengaruh total variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,6563 atau sekitar 65%, dan sisanya sebesar 35% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian didapat persamaan regresi yang dapat menjelaskan bagaimana bentuk pengaruh dari setiap variabel bebas pada variabel terikat. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{TPT} = 0,2176015(\text{Cons}) - 0,0883934\text{Ln}(\text{Upah}) + 0,0295291\text{Ln}(\text{PDRB}) - 0,0330812 \text{Ln}(\text{Penduduk}) + e$$

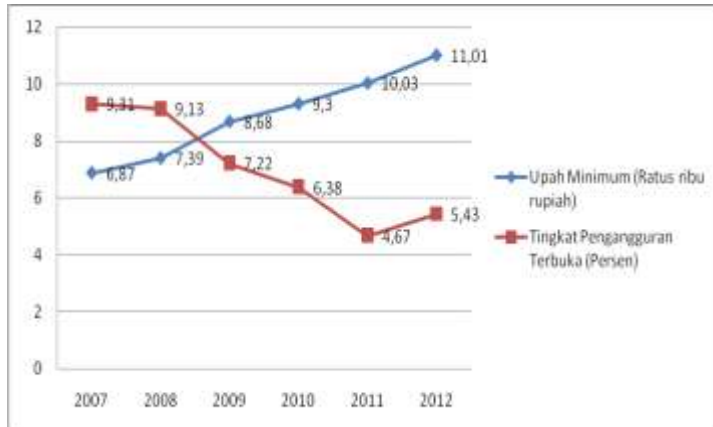
Interpretasi yang dapat dijelaskan dari model regresi diatas sebagai berikut :

1. Nilai koefisien variabel Ln(upah) sebesar 0,0883934 dan bertanda negatif, menyatakan bahwa setiap peningkatan Ln(upah) sebesar 1 persen maka variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan menurun sebesar 0,09 persen.
2. Nilai koefisien variabel Ln(pdrb) sebesar 0,0295291 dan bertanda positif, menyatakan bahwa setiap peningkatan Ln(pdrb) sebesar 1 persen maka variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan meningkat sebesar 0,03 persen.
3. Nilai koefisien variabel Ln(penduduk) sebesar 0,0330812 dan bertanda negatif, menyatakan bahwa setiap peningkatan Ln(penduduk) sebesar 1 persen maka variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan menurun sebesar 0,03 persen.

## Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah Minimum mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengangguran terbuka artinya setiap kenaikan upah minimum menyebabkan tingkat pengangguran terbuka menurun di wilayah Gerbangkertasusila. Gambar 7 dibawah ini terdapat perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan upah minimum di wilayah Gerbangkertasusila.

Gambar 7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Upah Minimum di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012



Sumber : BPS Jatim, 2013 (diolah)

Dari gambar 7 dan juga hasil analisis yang telah dilakukan diatas bahwa dari kenaikan upah minimum mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dengan kata lain kenaikan upah minimum setiap tahunnya menyebabkan turunnya tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila. Sesuai dengan teori model dual sektor yang menyatakan bahwa turunnya tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan karena setelah terdapat kebijakan upah minimum yang meningkat tiap tahunnya menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor formal lebih sedikit sehingga masyarakat yang ada di wilayah Gerbangkertasusila memilih untuk berpindah di sektor informal. Dengan berpindahnya tenaga kerja ke sektor informal masyarakat akan tetap mendapatkan pekerjaan meskipun sektor informal belum tercover kebijakan upah minimum tetapi masyarakat tidak kehilangan pekerjaannya atau menjadi pengangguran. Terbukti di wilayah Gerbangkertasusila tenaga kerja yang terserap di sektor informal rata-rata sekitar 70% dan jauh lebih tinggi daripada sektor formal yang hanya menyerap tenaga kerja rata-rata sekitar 30%. Gambar 8 dibawah ini menunjukkan perbandingan upah minimum dengan tenaga kerja yang terserap di sektor informal di Gerbangkertasusila tahun 2007-2012.

Gambar 8 Perbandingan Upah Minimum dengan Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Informal di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012



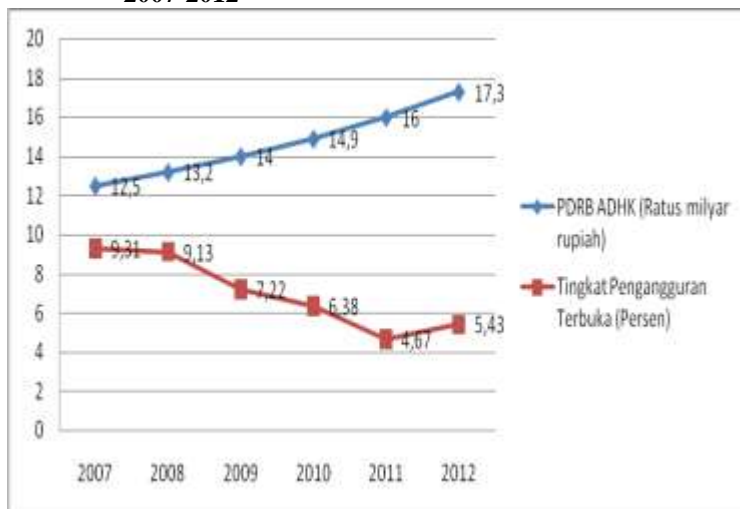
Sumber : BPS Jatim, 2013 (diolah)

Dari gambar 8 dapat terlihat bahwa setiap tahunnya upah minimum meningkat diikuti dengan penyerapan tenaga kerja di sektor informal juga meningkat tiap tahunnya. Besarnya sektor informal di wilayah Gerbangkertasusila inilah yang menyebabkan kondisi kelebihan tenaga kerja tidak selalu menunjukkan pengangguran yang meningkat, kondisi perpindahan dari sektor formal ke sektor informal inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila dapat berkurang meskipun upah minimum meningkat.

#### Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

PDRB mempunyai hubungan positif dengan tingkat pengangguran terbuka artinya setiap kenaikan PDRB akan menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila meningkat. Gambar 9 dibawah ini menunjukkan perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka dengan PDRB di wilayah Gerbangkertasusila.

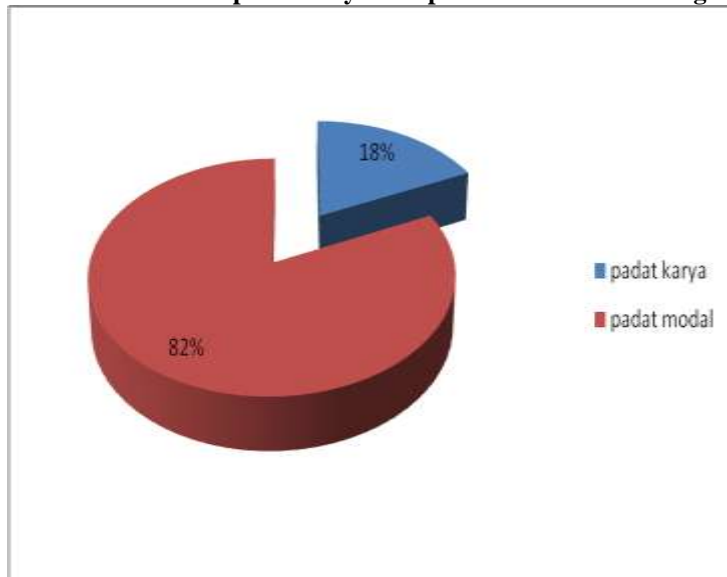
Gambar 9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan PDRB di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012



Sumber : BPS Jatim, 2013 (diolah)

Dari gambar 9 dan hasil analisis yang telah dilakukan diatas menyakatan bahwa terdapat pengaruh positif dari peningkatan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila. sesuai dengan penelitian terdahulu Nainggolan (2009) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara” dan juga dari Teori Pertumbuhan Ekonomi yang menjadi rujukan dan persamaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran yang bersifat positif. Dikatakan berpengaruh positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di wilayah Gerbangkertasusila berorientasi pada padat modal. Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat modal mengakibatkan perusahaan berusaha mencari keuntungan maksimal dengan cara mengurangi biaya produksi salah satunya dengan cara mengganti sumber daya manusia dengan keberadaan teknologi. Berikut ini gambar diagram perbandingan industri yang berorientasi pada padat modal dan padat karya di Gerbangkertasusila.

Gambar 10 **Industri padat karya dan padat modal di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012**



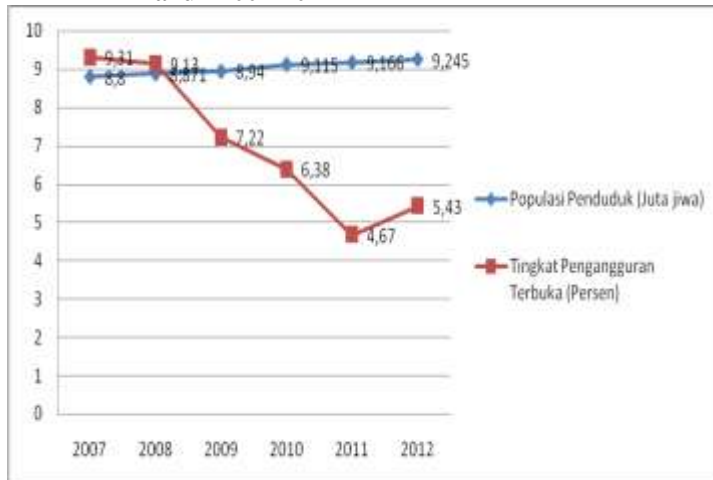
Sumber: BPS Jatim, 2013 (diolah)

Seperti yang terlihat pada gambar 10 provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Gerbangkertasusila yang menjadi pusat dari kegiatan perekonomian industrinya didominasi oleh industri padat karya. Dari gambar diatas terbukti industri padat modal jauh lebih mendominasi dibanding industri padat modal. Investor lebih memilih menanamkan modalnya ke industri padat modal karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar daripada menanamkan modal di industri padat karya, ditambah lagi dengan adanya kebijakan upah minimum kabupaten yang meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya industri padat modal inilah yang mengakibatkan keberadaan sumber daya manusia menjadi rawan terganti oleh teknologi karena pihak dari perusahaan pasti menginginkan menekan biaya produksi untuk meraih keuntungan maksimal salah satunya dengan mengganti sumber daya manusia dengan teknologi.

### **Pengaruh Populasi Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Penduduk mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengangguran terbuka artinya setiap populasi penduduk meningkat mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila menurun. Gambar dibawah ini menunjukkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan populasi penduduk di wilayah Gerbangkertasusila. Gambar 11 dibawah ini perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan populasi penduduk di Gerbangkertasusila tahun 2007-2012.

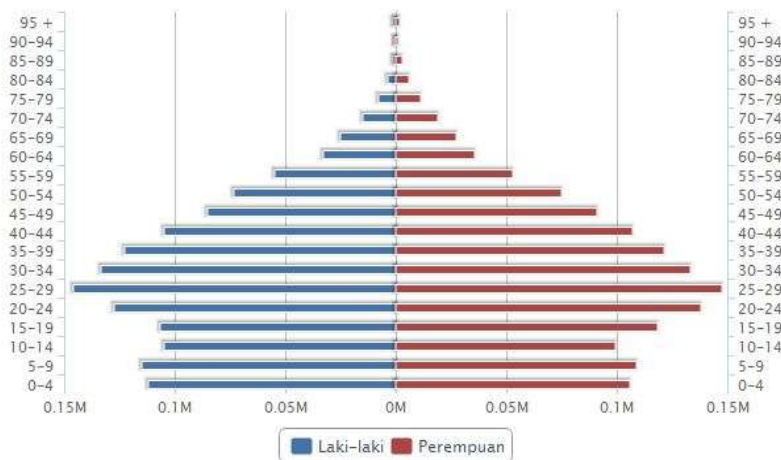
**Gambar 11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Populasi Penduduk di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012**



Sumber : BPS Jatim ,2013 (diolah)

Dari gambar 11 dan hasil penelitian diatas menyatakan bahwa apabila populasi penduduk meningkat maka tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila menurun. Kondisi tersebut karena Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang mempunyai populasi penduduk cukup besar khususnya di wilayah Gerbangkertasusila yang rata-rata mempunyai populasi penduduk yang besar. Kelebihan jumlah penduduk disuatu daerah atau bahkan negara tidak selalu menyebabkan permasalahan yang dinamakan pengangguran. Dalam realitanya di wilayah Gerbangkertasusila yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka turun meskipun jumlah populasi penduduk meningkat adalah 1) kenaikan jumlah penduduk usia sekolah berumur 15 tahun kebawah yang tinggi dan dalam kondisi perekonomian keluarga yang kurang baik, sehingga mereka terpaksa masuk ke dalam pasar kerja untuk melakukan pekerjaan dan dapat membantu ekonomi keluarganya. 2) kenaikan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang diikuti dengan kemampuan untuk melakukan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sesuai dengan teori deviden demografi atau bonus demografi yang meyakini bahwa besarnya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menjadi kekuatan dalam wilayahnya karena mereka semua dapat melakukan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga pengangguran dapat menurun. Gambar 12 dibawah ini terdapat piramida penduduk yang dapat menggambarkan rata-rata populasi penduduk di Gerbangkertasusila berdasarkan umur.

**Gambar 12 Piramida Penduduk Berdasarkan Umur di Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012**



Sumber : BPS Jatim, 2013 (diolah)



Fenomena tersebut sesuai dengan teori penduduk modern dari pandangan Merkantilisme yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang banyak sebagai elemen yang penting dalam kekuatan negara yaitu merupakan faktor yang penting di dalam kekuatan negara dan memegang peranan dalam meningkatkan penghasilan dan kekayaan negara. Bonus demografi yang terdapat di wilayah Gerbangkertasusila dapat dimanfaatkan dengan penduduk yang berusia produktif kerja di sektor formal tentunya juga didukung sektor informal yang kuat sehingga dapat menekan angka pengangguran.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari analisis data yang telah dilakukan menunjukkan terdapat pengaruh secara positif maupun negatif dari variabel upah minimum, PDRB, dan populasi penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila pada tahun 2007-2012. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan di bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, upah minimum mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan apabila upah minimum meningkat maka tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila akan menurun. Fenomena ini terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja menjadi menurun di sektor formal ketika upah minimum meningkat sehingga kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut berpindah ke sektor informal.

Kedua, PDRB mempunyai hubungan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan apabila PDRB meningkat maka tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila juga akan meningkat. Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila berorientasi pada padat modal sehingga banyak perusahaan yang mengurangi biaya inputnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan teknologi.

Ketiga, populasi penduduk mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan apabila populasi penduduk meningkat maka tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila akan menurun. Fenomena yang terjadi di Gerbangkertasusila karena banyak penduduk usia sekolah (15 tahun kebawah) yang sudah masuk ke dalam pasar kerja untuk dapat membantu perekonomian keluarganya dan bonus demografi yang terdapat di setiap wilayah dengan rata-rata penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 75% dapat melakukan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dapat menurun.

### **Saran**

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di penelitian ini maka peneliti sedikit memberikan saran kepada pihak-pihak terkait.

Pertama, dilihat dari peran Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah Gerbangkertasusila terkait dengan kebijakan upah minimum. Menurut peneliti peran Pemerintah Daerah sudah benar karena semakin tahun harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat sehingga upah minimum yang harus ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja, apabila upah meningkat produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat baik tenaga kerja yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal. Tentunya kebijakan upah minimum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah juga harus bisa menemukan titik keseimbangan dimana antara permintaan buruh dengan penawaran pengusaha harus seimbang agar kedua belah pihak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Kedua, melihat dari pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat modal. Dalam kondisi seperti ini peneliti melihat pihak yang berperan penting adalah pihak perusahaan dan Pemerintah Daerah. Karena menurut peneliti dua pihak tersebut harus bisa membuat regulasi atau kebijakan tentang pemberdayaan sumberdaya manusia. Dalam pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat modal menyebabkan beberapa diantara tenaga kerja kehilangan pekerjaannya karena pihak perusahaan akan menekan biaya inputnya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal salah satunya dengan mengganti tenaga manusia dengan teknologi. Selain itu juga dari masyarakat juga harus lebih inovatif atau mempunyai kemampuan dan usaha untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang berorientasi pada padat karya karena industry padat karya juga dapat membantu masyarakat khususnya untuk menambah kesempatan kerja.

Ketiga, populasi penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Peneliti melihat dalam fenomena pertama yang terjadi di Gerbangkertasusila yang menunjukkan terdapat banyak penduduk yang masih berusia sekolah (15 tahun kebawah) sudah masuk ke dunia kerja. Sebaiknya Pemerintah Daerah juga harus membuat pengawasan kepada penduduk yang masih dalam usia sekolah di pasar kerja dan mengembalikan mereka untuk

melanjutkan pendidikannya sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbud yang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk belajar 12 tahun sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat atau bias menjadi generasi emas untuk kedepannya. Fenomena kedua yaitu tentang bonus demografi yang ada di Gerbangkertasusila, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat unit pengembangan kemampuan berwirausaha sehingga bonus demografi yang terdapat di Gerbangkertasusila bias dimanfaatkan dan tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja. Fenomena ketiga terdapat banyak faktor juga yang bias menyebabkan pengangguran apabila populasi penduduk dengan jumlah yang sudah terlalu banyak, salah satunya adalah faktor migrasi. Perpindahan penduduk dari desa menuju ke wilayah Gerbangkertasusila apabila tidak dilakukan regulasi tentang migrasi maka terdapat juga dampak negatif dari populasi penduduk dengan jumlah yang sudah terlalu banyak, salah satunya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan dan juga terjadinya ketimpangan antara satuan wilayah pengembangan (SWP) Gerbangkertasusila dengan satuan wilayah pengembangan lainnya yang ada di Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. [bps.go.id](http://bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*. [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. 2013. *Bangkalan Dalam Angka 2013*. [bangkalankab.bps.go.id](http://bangkalankab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. 2013. *Letak Geografi dan Topologi Kabupaten Bangkalan*. [bangkalankab.bps.go.id](http://bangkalankab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2013. *Gresik Dalam Angka 2013*. [gresikkab.bps.go.id](http://gresikkab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2013. *Letak Geografi dan Topologi Kabupaten Gresik*. [gresikkab.bps.go.id](http://gresikkab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2013. *Lamongan Dalam Angka 2013*. [lamongankab.bps.go.id](http://lamongankab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2013. *Letak Geografi dan Topologi Kabupaten Lamongan*. [lamongankab.bps.go.id](http://lamongankab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2013. *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2013*. [mojokertokab.bps.go.id](http://mojokertokab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2013. *Letak Geografi dan Topologi Kabupaten Mojokerto*. [mojokertokab.bps.go.id](http://mojokertokab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2013. *Sidoarjo Dalam Angka 2013*. [sidoarjokab.bps.go.id](http://sidoarjokab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2013. *Letak Geografi dan Topologi Kabupaten Sidoarjo*. [sidoarjokab.bps.go.id](http://sidoarjokab.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. 2013. *Kota Mojokerto Dalam Angka 2013*. [mojokertokota.bps.go.id](http://mojokertokota.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)

- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. 2013. *Letak Geografi dan Topologi Kota Mojokerto*. [mojokertokota.bps.go.id](http://mojokertokota.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2013. *Kota Surabaya Dalam Angka 2013*. [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2013. *Letak Geografi dan Topologi Kota Surabaya*. [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id) (diakses pada tanggal 30 Desember 2013)
- Alghofari. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro
- Ananta. 2013. *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminaslitas, Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya
- Arsyad. 1997. *Media pengajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dornbusch dan Fischer. 1992. *Makroekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga
- Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi Kedua)*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Karib. 2012. *Analisis Pengaruh Produksi, Investasi, dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Utara*. Padang: Universitas Andalas
- Kasliwal. 1995. *Development Economics. South-Western Publishing, Cincinnati Ohio*. United States of America.
- Kaufman dan Hotchkiss. 1999. *The Economics of Labour Markets, Fifth Edition*. The Dryden Press.
- Kusnaini. 1998. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Mankiw. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Nainggolan. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis Ketenagakerjaan (tidak dipublikasikan). Medan : Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nachrowi. 2004. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Gramedia Widiasarana
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- Pratomo dan Saputra. 2011. *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan Tinjauan UUD 1945, Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya
- Raselawati. 2011. *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKm di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Sholeh. 2005. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia*. Yogyakarta
- Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

- Sitanggang dan Nachrowi . 2004. *Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 5 (1) Juli : 103 – 133.
- Sugiyono. 2000. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sukirno. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sukirno. 2004. *Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suparmoko. 1997. *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. Yogyakarta. BPFE. 568 hal.
- Todaro. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Todaro dan Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Edisi 9. Jakarta: Erlangga
- Zamrowi. 2007. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Semarang: Universitas Dipenogoro